

# Kedaulatan Rakyat

## Analisis Menkeu Baru

Drs Y Sri Susilo MSI



**M CHATIB BASRI** (MCB) telah dikukuhkan Presiden sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru menggantikan Agus DW Martowijoyo. Seperti diketahui MCB sebelumnya menjabat Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), sedangkan Menkeu yang lama akan menjabat sebagai Gubernur BI (Bank Indonesia). Sebelumnya sempat beredar beberapa nama calon Menkeu, seperti Gita Wiriyawan, Darmin Nasution dan Any Retnowati.

SBY mempunyai alasan yang kuat untuk memilih MCB. Alasan tersebut adalah MCB seorang ekonom yang berpengalaman dan berwawasan luas. Kinerja MCB sebagai Kepala BKPM juga dianggap sangat baik. Pengalaman yang lain pernah menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan (2006-2010), Sherpa Indonesia untuk G20 (2008) dan Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN). Berdasarkan hal tersebut SBY menilai Chatib paling pantas menjadi Menkeu baru. MCB sendiri menamatkan pendidikan sarjannya di Fakultas Ekonomi UI (1992). Selanjutnya memperoleh Master (1996) dan Doktor (2001) bidang Ekonomi dari Australia National University. Pengalaman akademiknya antara lain menjadi peneliti tamu dan konsultan di beberapa lembaga internasional.

MCB akan menjalankan tugas sebagai Menkeu sampai Oktober 2014. Tugas yang dibebankan kepada Menkeu baru memang tidak ringan. Menkeu baru harus mampu menjalankan tugas: Pertama, mengamankan penerimaan negara, dalam arti meminimalkan kebocoran penerimaan pajak dan cukai. Melanjutkan reformasi birokrasi sehingga pelaksanaan tata kelola (*good governance*)

\* Bersambung hal 7 kol 5

## Menkeu..... Sambungan hal 1

di Kementerian Keuangan semakin baik termasuk kualitas mental dan spiritual sumberdaya manusianya.

Kedua, mengamankan kesinambungan fiskal dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3%. Kebijakan fiskal harus diimplementasikan dengan asas kehati-hatian (*prudential*) dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkualitas yang mencapai 6,2% pada tahun ini. Menkeu harus mampu memastikan belanja kementerian dan lembaga dilaksanakan dengan berkualitas dan tepat waktu.

Ketiga, dengan paket kebijakan yang menumbuhkan iklim investasi menarik dan nyaman (*favourable*) bagi calon investor baik asing maupun domestik. Paket kebijakan tersebut dapat berupa insentif, relaksasi dan kebijakan lainnya.

Keempat, mampu membangun koordinasi dengan lintas sektor termasuk dengan BI sebagai pemegang otoritas moneter. Koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus dijalankan dengan baik sehingga sasaran ekonomi (pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penu-

runan kemiskinan) dapat dicapai secara optimal.

Penunjukan MCB sebagai Menkeu disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan pengusaha, parlemen, dan akademisi. Sambutan yang baik ini tentu dapat digunakan sebagai modal awal untuk menjalankan tugas sebagai Menkeu.

Selanjutnya masyarakat boleh berharap terhadap Menkeu baru antara lain: Pertama, berani melakukan evaluasi dengan mengurangi defisit APBN dan utang luar negeri secara bertahap. Berani mengusulkan pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap dan signifikan

Kedua, MCB sebagai profesional yang kompeten, independen, dan bukan dari partai politik diharapkan mampu menghadapi lobi-lobi anggaran dari berbagai pihak khususnya terkait menjelang Pemilu 2014. Chatib diharapkan tegas dan disiplin dalam menjalankan kebijakan fiskal seperti pendahulunya. Singkatnya posisi Menkeu harus bebas dari kepentingan politik praktis.

(Penulis Dosen FE UAJY, Pengurus ISEI  
Cabang Yogyakarta)-b

23 Mei 2013